

**JSKK** Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban

**Aksi Damai di Depan Istana Presiden, 14 Juni 2007, Kamis Ke-21**

## **Pantaskah Indonesia menjadi Dewan HAM?**

**K**etika Indonesia terpilih menjadi Dewan HAM, bangsa ini seharusnya bangga. Dunia mempunyai persepsi bahwa bangsa ini adalah bangsa yang beradab, santun. Kita pun seharusnya bangga pemerintah telah membuat suatu sejarah baru.

Suatu sejarah yang sangat kontradiksi antara kulit dan isi, masih banyaknya persoalan kasus pelanggaran HAM di dalam negeri yang belum terselesaikan oleh pemerintah.

Beberapa pelanggaran HAM yang belum terselesaikan antara lain tidak terungkap dengan jelas kasus '65 siapa pelakunya yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan massal, kasus penghilangan paksa yang terjadi tahun 1997/1998, kasus Tanjung Priok, Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, Talangsari, Penghilangan dan pembunuhan aktivis kemanusiaan Aceh Jafar Sidiq (2001), Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay (2001) Aktivis HAM Aceh Musliadi (2002), Munir dan yang baru – baru ini tragedi Pasuruan.

Hal tersebut terjadi karena proses politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM, otoritas Politik Militer yang dominan atas otoritas politik sipil menjadikan militer bebas bertindak leluasa dengan moncong senjatanya. Ditambah dengan adanya kekuasaan DPR untuk menentukan sebuah kasus melakukan pelanggaran HAM atau tidak. Bebasnya tersangka militer pelaku pelanggaran HAM, bahkan tersangka mendapat promosi, seolah-oleh pelanggaran HAM yang dilakukannya adalah sebuah prestasi.

Sementara itu, rakyat, korban, orang tua korban penculikan, pembunuhan tetap menjerit meminta pemerintah menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM di tegakkan.

Ketika kita tahu kulit dan isi berbeda, betulkah kita bangga menjadi dewan HAM? Muncul pertanyaan di benak ini “Mungkinkah persoalan HAM dapat diselesaikan Pemerintah?” Jawabnya **Maybe. Maybe Yes, Maybe No.**